

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia telah memasuki era globalisasi, sebagai dampaknya muncul isu-isu baru yang bersifat transnasional. Salah satu isu tersebut adalah isu yang berbasis gender, yang merupakan lingkup kajian baru dalam ilmu hubungan internasional (Burchiil & Linklater, 2009). Tulisan ini akan membahas mengenai isu yang berbasis gender, yaitu LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) di Thailand. Selain itu, juga akan menjelaskan peranan dari jaringan advokasi transnasional yang membingkai isu *LGBT Rights*, dimana hal ini mendapat dorongan dari masyarakat Thailand karena norma dan nilai budaya Thailand. Isu ini tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, maupun agama. Isu LGBT di Thailand telah menjadi sebuah isu yang menarik bagi berbagai pihak terutama pada pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap kaum LGBT. Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki perbedaan tersendiri terkait status warga negaranya, yang lazimnya hanya laki-laki dan perempuan tidak berlaku di Thailand karena di negara ini tumbuh subur kaum LGBT yang merupakan bagian dari sejarah Thailand.

Perkembangan isu LGBT di Thailand ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah negara Thailand itu sendiri. Sejarah Thailand saat berbentuk monarki absolut memegang kepercayaan Budha yang kuat. Kepercayaan ini meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu laki-laki, perempuan, dan hermaprodit yang bisa berupa perempuan atau laki-laki (Matzner, 2002). Kepercayaan ini juga menyebabkan masyarakat saat itu menerima manusia yang secara seksualitas berbeda. Namun, memasuki abad ke-19, Thailand beralih dari sistem monarki yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang monarki konstitusional. Pada tahun 1932, perubahan sistem ini mengadopsi kode dan konsep yang berkaitan dengan gender dan seksualitas pada

konstruksi sosial moralitas (UNDP & USAID, 2014). Perubahan ini menyebabkan adanya kebijakan yang berbeda dengan nilai kepercayaan sebelumnya mengenai perilaku LGBT di Thailand, sehingga hal ini berakibat kurang adanya penerimaan terhadap mereka yang berimplikasi pada terjadinya diskriminasi dan tindakan kekerasan oleh masyarakat Thailand. Pengaruh barat yang ada juga berperan dalam merubah stigma yang ada pada masyarakat sehingga menyebabkan kaum LGBT termarginalkan dari kehidupan sosialnya, baik dalam mendapat akses publik maupun pekerjaan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah Thailand dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kaum LGBT. Pada aspek tenaga kerja, *International Labour Organization* (ILO) mencatat bahwa Thailand belum mertaifikasi Konvensi Diskriminasi (*Employment and Occupation*) tahun 1958 No. 111, yang mewakili hak dalam bekerja. Hukum yang ada di Thailand juga tidak secara eksplisit merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender.

Kompleksitas permasalahan kaum LGBT di Thailand telah menarik perhatian sejumlah *Non-Government Organization* (NGO) yang berfokus pada isu hak asasi manusia khususnya kaum LGBT. NGO seperti *Rainbow Sky Association*, *Purple Sky*, *Foundation for SOGI Rights and Justice* (FOR-SOGI), dan *Anjana Suvarnananda*, serta NGO lain yang tidak disebutkan. Tujuan dari para NGO ini adalah untuk mendorong adanya kesetaraan dan keadilan terhadap LGBT pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Thailand. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, dimana tindakan diskriminasi maupun kriminalisasi homoseksualitas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak LGBT. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi NGO dan menjadi dasar dalam melakukan pergerakannya untuk mendorong pemerintah Thailand menciptakan kesetaraan terhadap LGBT. Untuk mendorong efektifitas agenda pergerakan kaum LGBT, NGO di Thailand tidak hanya menggunakan strategi dengan saling bekerja sama satu sama lain membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional, tetapi juga melibatkan organisasi internasional seperti

ILGA, UNDP, maupun, ILO. Keterlibatan organisasi-organisasi internasional dipandang sebagai cara yang efektif untuk mendesak pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang melindungi kaum LGBT, bahkan dapat melegalkan status mereka di mata hukum negara Thailand yang ditunjukkan melalui terbitnya undang-undang legalitas LGBT tahun 2015 (UNDP & USAID, 2014).

Namun, tentunya upaya yang dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional ini tidak lepas dari adanya peran dari masyarakat Thailand yang dipengaruhi oleh aspek historis dan budaya di Thailand terhadap kaum LGBT. Masyarakat Thailand sebelumnya telah memiliki norma dan nilai terkait dengan status gender dan seksualitas masyarakatnya. Masyarakat Thailand sebelumnya mempercayai adanya delapan belas gender selain laki-laki dan perempuan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Thailand bahwa banyaknya status gender ini disebabkan oleh kepercayaan tentang karma yang didapatkan seseorang di dunia (Winter, 2006). Oleh karena itu, upaya TANs dalam isu LGBT di Thailand berdampak pada tumbuhnya lagi kepercayaan tersebut di tengah masyarakat setelah sebelumnya teresresi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, “Mengapa *Transnational Advocacy Networks* dalam isu LGBT di Thailand dapat mendorong legalitas LGBT sehingga diterima oleh masyarakat Thailand?”

1.3. Reviu Literatur

Jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari sejumlah NGO di Thailand melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah Thailand menciptakan sebuah hukum yang secara jelas melindungi kehidupan kaum LGBT. Legalisasi terhadap kaum LGBT diperlukan agar terjamin hak-hak kaum LGBT yang selama ini terabaikan karena adanya marginalisasi terhadap mereka. Tidak hanya menyangkut isu

LGBT, dalam menyelesaikan permasalahannya TANs biasanya menggunakan sumber dukungan bagi jaringan advokasi transnasional ini, baik melalui dukungan akar rumput maupun melalui dukungan internasional.

1.3.1. *Transnational Advocacy Networks* akar rumput

Jaringan advokasi transnasional dapat dipahami sebagai suatu gabungan dari organisasi pergerakan yang berada di dua atau lebih negara yang berbeda (Brandy & Smith, 2005). Jaringan ini terdiri dari sejumlah aktor baik organisasi antar pemerintah, swasta, maupun organisasi non-pemerintah (NGO) level domestik hingga internasional. Aktor-aktor ini memiliki agenda yang menjadi isu utama dalam membentuk suatu jaringan transnasional, dimana isu tersebut merupakan isu minor yang berbasis kemanusiaan.

Marissa King dalam tulisannya yang berjudul *Cooptation or Cooperation: The Role of Transnational Advocacy Organizations in The Zapatista Movement*, menjelaskan agenda dari jaringan transnasional yang bernama *The Ejercito Zapatista de Liberacion* (Zapatista Army of National Liberation) adalah berfokus pada hak asasi manusia (HAM) (King, 2004). Jaringan ini merupakan gerakan yang berasal dari akar rumput para petani. Jaringan advokasi ini merupakan jaringan yang berbasis internet yang memanfaatkan kemajuan teknologi, dimana menjadi pusat dari gerakan untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada penduduk Chiapas, Meksiko. Jaringan advokasi *The Ejercito Zapatista de Liberacion* (Zapatista Army of National Liberation) menggunakan strategi dengan mengkomunikasikan isu perlawanan petani di Meksiko melalui internet untuk memperoleh perhatian publik. Pada tahun 1994, terjadi sebuah peristiwa revolusi yang disebut sebagai revolusi pertama terhadap sistem post-modern, yang disebut gerakan Zapatista (Faisal, 2007). Revolusi ini merupakan pemberontakan terhadap kuasa *global governance* yang membuat kehidupan petani di Chiapas semakin menderita. Namun, seiring perkembangannya, gerakan Zapatista berubah menjadi sebuah gerakan *civil society* untuk menggugat ketidakadilan yang

mengacu pada bentuk ketidakadilan dengan menuntut hak tanah, makanan, layanan sosial, akses kesehatan dan perawatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap komersialisme (King, 2004).

Agenda dari jaringan advokasi transnasional *The Ejercito Zapatista de Liberacion* (Zapatista Army of National Liberation) dengan mengangkat isu hak asasi manusia dengan memberikan kehidupan yang adil khususnya bagi petani di Meksiko. Jaringan ini mencapai keberhasilannya dengan menekan pemerintah melalui opini publik yang dikembangkan melalui jaringan internet selama kurang lebih dua belas hari sejak revolusi Zapatista. Kehadiran jaringan advokasi transnasional ini memainkan peran penting dalam menekan pemerintah Meksiko untuk tidak melakukan tindakan represi dalam skala besar. Tidak hanya itu, jaringan advokasi transnasional Zapatista juga memiliki peran sentral dalam menjaga agar gerakan petani tetap hidup dengan menyebarkan informasi ke publik (King, 2004). Keberhasilan jaringan advokasi transnasional Zapatista merupakan contoh keberhasilan terhadap TANs yang berasal dari akar rumput guna menekan pemerintah untuk melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi.

Selanjutnya, contoh jaringan advokasi transnasional yang berbasis dari gerakan akar rumput terdapat pada isu hak asasi bagi kaum LGBT. Setiap manusia dilahirkan pada dasarnya memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya, yaitu disebut dengan hak asasi manusia. Jack Donnely dalam tulisannya mengatakan bahwa '*human rights are rights that human being posses because they are human beings*' (Berting, et al., 1990). Kaum LGBT berhak atas hak asasi manusia yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, perjuangan kaum LGBT dalam menuntut persamaan atas hak asasi manusia mulai banyak diperjuangkan di beberapa negara.

Di wilayah Asia, China merupakan negara yang menjadi rumah bagi populasi LGBT khususnya homoseksual terbesar di dunia. Keberhasilan jaringan advokasi ini karena adanya dukungan pemerintah lokal. Timothy Hildebrandt dalam tulisannya

yang berjudul *Same-sex Marriage in China? The Strategic Promulgation of a Progressive Policy and Its Impact on LGBT Activism*, menjelaskan tentang pergerakan masyarakat sipil yang mendorong kebijakan legalisasi kaum LGBT yang diiringi oleh kebijakan legalisasi pernikahan sesama jenis (Hildebrandt, 2011). Kaum LGBT ini beranggapan bahwa pernikahan sesama jenis merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Namun, terdapat hal menarik dalam tulisan Hildebrandt ini, bahwa dorongan terhadap kebijakan pernikahan sesama jenis di China bukan hanya berasal dari akar rumput, tapi juga dipengaruhi oleh sistem pusat politik pemerintah. China sebenarnya tidak memiliki kampanye domestik untuk melegalkan pernikahan sesama jenis yang masif seperti di Barat, karena para aktivis memiliki kapasitas yang lemah dan terbatas. Tetapi, dorongan yang kuat justru muncul dari pemerintah China itu sendiri (Hildebrandt, 2011).

Pemerintah China mendukung kebijakan pernikahan sesama jenis dengan melihat manfaat potensial yang dapat diberikan kepada negara. Hildebrandt meminjam konsep norma strategis dalam hubungan internasional untuk menganalisa alasan pemerintah China mendorong kebijakan tersebut. Dalam sejarahnya, isu hak asasi manusia merupakan isu yang sensitif bagi China, terutama saat terjadinya tragedi di Lapangan Tiananmen tahun 1989 yang merupakan peristiwa pembantaian ribuan mahasiswa. Sejak saat itu, China menjadi fokus dalam pemberitaan utama dunia internasional mengenai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Drinan & Kuo, 1992). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pernikahan sesama jenis merupakan upaya pemerintah China untuk menangkis kritik terhadap catatan hak asasi manusia di China. China mulai membangun kepercayaan dunia internasional terhadap peningkatan terjaminnya hak asasi manusia warganya. Hal ini juga didukung oleh tidak adanya budaya yang mengakar di masyarakat China untuk mendiskriminasi kaum LGBT. Meskipun pengaruh pemerintah China cukup besar dalam legalisasi kebijakan pernikahan sesama jenis, tetapi peran jaringan aktivis LGBT di China tidak bisa dilepaskan terutama dalam mempromosikan isu anti HIV/AIDS bagi kaum LGBT.

1.3.2 *Transnational Advocacy Networks* internasional

Selain terdiri dari jaringan advokasi yang berbasis akar rumput, dukungan internasional juga cukup mempengaruhi pergerakan dari jaringan advokasi. Hal ini terjadi ketika daya dorong masyarakat tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. Isu kesetaraan perempuan membuka penelitian tentang jaringan advokasi transnasional yang melibatkan dukungan internasional. Perempuan selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah, ada *stereotype* gender dalam ranah hubungan internasional yang menempatkan laki-laki menjadi aktor dalam berbagai urusan politik. Hal ini mengakibatkan perempuan termarginalkan dan tidak dilibatkan dalam agenda-agenda politik (Tickner, 1992). Oleh karena itu, kemudian muncul berbagai bentuk perlawanan gerakan kaum feminis terhadap berbagai penindasan yang terjadi pada perempuan.

Gerakan perempuan di Rusia merupakan salah satu contoh dari perlawanan gerakan feminis terhadap peran perempuan dalam agenda politik di Rusia. Hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal yang berjudul *Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women's Activism*, dimana jaringan gerakan perempuan di Rusia yang bernama *Network of East-West Women* (NEWW) mengedepankan emansipasi terhadap perempuan. NEWW tidak hanya menjalin kerjasama dengan jaringan lokal di Rusia, tetapi juga membentuk jaringan yang sifatnya transnasional dengan melibatkan organisasi *the United States-Newly Independent States (US-NIS) Women's Consortium* (Sperling, Ferree, & Risman, 2001). Organisasi tersebut memiliki basis di Amerika Serikat dan berfungsi sebagai saluran pendanaan luar negeri. NEWW dalam gerakannya bertujuan mendobrak ideologi komunisme yang melekat pasca Soviet di Rusia. Ideologi ini memperparah ketidaksetaraan gender khususnya perempuan di pasar kerja. Jaringan advokasi transnasional NEWW melakukan proses negosiasi baik dengan sesama aktivis maupun pemerintah untuk memperbolehkan perempuan memiliki akses dalam mendapatkan

pekerjaan. Yakushkina melalui tulisannya mendukung hal tersebut, dimana gerakan perempuan di Rusia pada dasarnya memiliki tujuan untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam pekerjaan. Yakushkina juga menjelaskan bahwa ada jaringan advokasi lain di Rusia yang terletak di wilayah Voronezh, yang bernama *Zhensovety Moskvyy* (Yakushkina, 2014). Jaringan tersebut telah berhasil mengumpulkan 15.000 aktivis perempuan di Rusia hingga ke desa-desa, dengan tujuan untuk terbentuknya dewan wanita yang memperbolehkan perempuan terlibat aktif dalam pekerjaan sosial, amal, perawatan kesehatan, maupun dalam agenda pemerintahan.

Selanjutnya, pada isu *LGBT Rights* di Amerika Serikat juga merupakan contoh dari jaringan advokasi yang melibatkan aktor internasional, dimana menariknya di Amerika jaringan tersebut menjadi organisasi internasional terhadap kaum LGBT. Gerakan LGBT paling masif terjadi di Amerika Serikat, dengan adanya gelombang pergerakan masyarakat dan aktivis menuntut adanya hak asasi manusia bagi kaum LGBT. Di Amerika, pergerakan kaum LGBT dimulai sejak tahun 1969 yang ditandai dengan peristiwa *Stonewall Riots* di New York. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan dan pergerakan masyarakat atas terjadinya tindak kekerasan yang diterima kaum gay dan lesbian oleh kepolisian New York (Altman, 1972). Kejadian tersebut terus diperingati secara internasional sebagai *Stonewall Day*, yang menjadi simbol identitas kaum LGBT sebagai kekuatan politik di Amerika.

Pergerakan masyarakat sipil dan aktivis dalam isu *LGBT Rights* di Amerika dijelaskan secara lebih mendalam oleh Julie Mertus melalui karyanya yang berjudul *The Rejection of Human Rights Framings: The Case of LGBT Advocacy in the US* pada tahun 2007 (Mertus, 2007). Menurut Julie, pergerakan kaum LGBT di Amerika telah menjadi acuan atau inspirasi bagi gerakan LGBT internasional untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka dengan menggunakan strategi hak asasi manusia. Dalam tulisan ini pula, terdapat pembagian gerakan LGBT di Amerika berdasarkan periode yang berbeda, dimana setiap periode memiliki agenda perjuangan yang berbeda tapi tetap memiliki satu tujuan untuk memperjuangkan hak asasi kaum LGBT.

Pada tahun 1970an, perjuangan aktivis kaum LGBT di Amerika ditandai dengan perjuangan kaum aktivis yang menekankan pada radikalisme dan strategi konfrontasi mereka. Hal ini merupakan bentuk perjuangan para aktivis pasca peristiwa *Stonewall Riots* di New York. Karakter utama gerakan LGBT pada tahun 1970an adalah bersifat liberal, yang mengedepankan prinsip-prinsip liberal seperti *equality*, *integration*, *individual self-worth*, dan *self-determination*, yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran baru budaya hubungan sesama jenis (Mertus, 2007). Kemudian, gelombang gerakan LGBT memunculkan komunitas baru seperti *Gay Liberation Front* (GLF), yang bekerja di luar sistem politik Amerika dengan peningkatan kesadaran akan pengalaman kaum LGBT. Sedangkan *The Gay Activist Alliance* (GAA), yang menjadi penyeimbang bagi GLF. GAA bekerja di dalam sistem pemerintah Amerika dengan mempromosikan perubahan hukum dan tatanan sosial dalam masyarakat. Pergerakan aktivis kaum LGBT juga memberontak atas penetapan homoseksualitas ke dalam jenis penyakit dan gangguan mental. Hingga pada akhirnya perjuangan kaum LGBT membuahkan hasil dengan dihapuskannya homoseksualitas sebagai penyakit mental oleh *American Psychiatric Associations* tahun 1973 pada edisi kedua *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* atau DSM-II.

Selanjutnya, pada tahun 1980an, gerakan kaum LGBT lebih kepada perjuangan bertahan hidup dari isu HIV/AIDS yang melanda kaum gay di Amerika sehingga aktivis kaum LGBT menginginkan adanya perawatan terhadap kaum gay yang terkena HIV/AIDS. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1980an ini terbentuk *Queer Nations*, yang merupakan jaringan aksi langsung tanpa kekerasan terhadap kaum LGBT. *Queer Nations* mempromosikan ideologi “*fluid sexuality*”, yang berarti bukan gay atau *straight*, tetapi *queer* (Mertus, 2007). Periode 1990an, gerakan kaum LGBT lebih mengarah kepada politik yang berorientasi pada asimilasi. Advokasi LGBT di Amerika menggunakan dua strategi yang berbeda dalam keterlibatannya pada struktur politik, yaitu mempengaruhi struktur politik yang ada, dan memanfaatkan lembaga-lembaga

hukum dengan cara yang lebih strategis untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan akses menuju jalur politik utama.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan jaringan advokasi transnasional tidak hanya berasal dari dukungan dunia internasional, namun juga berasal dari masyarakat atau disebut akar rumput. Isu *LGBT Rights* merupakan salah satu agenda dari jaringan advokasi transnasional yang bertujuan untuk memberikan persamaan terhadap kaum LGBT. Tulisan tentang jaringan advokasi transnasional yang mengangkat isu *LGBT Rights* membahas bagaimana upaya kerjasama yang dilakukan oleh NGO dalam isu LGBT dengan membangun hubungan yang sifatnya transnasional dengan mempengaruhi pemerintah, terutama di negara barat. Namun, penulis melihat belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas bagaimana peran setiap NGO di dalam jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi pemerintah terkait isu LGBT, yang membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti UN. Tulisan ini akan membahas secara terinci mengenai upaya yang dilakukan oleh NGO dalam jaringan advokasi transnasional dalam bingkai isu *LGBT Rights*. Penulis akan memfokuskan pada negara Thailand, dimana isu LGBT masih belum banyak dibahas di Asia Tenggara. Padahal Thailand merupakan salah satu negara dengan kaum LGBT terbesar di dunia. Melalui tulisan ini pula, penulis akan menganalisa bagaimana proses legalisasi kaum LGBT di Thailand dan penerimaan masyarakat Thailand terhadap kebijakan tersebut. Tulisan ini menggabungkan jaringan advokasi transnasional yang berasal dari dukungan akar rumput maupun dunia internasional. Norma dan nilai budaya masyarakat Thailand sangat signifikansi bagi pencapaian legalitas LGBT.

1.4. Kerangka Konseptual

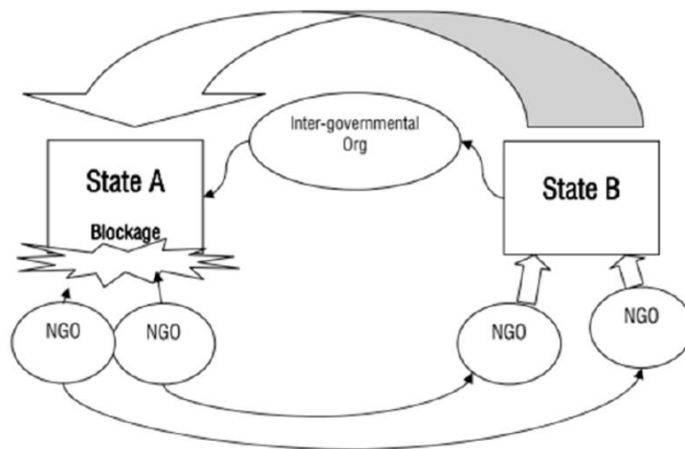
Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai strategi *transnational advocacy network* sebagai upaya mendorong legalitas LGBT di Thailand, penulis merasa perlu untuk mengaitkannya dengan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink.

Transnational Advocacy Networks (TANs)

Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan sebuah jaringan advokasi yang melibatkan aktifis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktifis di sebuah negara yang membentuk jaringan advokasi dengan negara lain. Jaringan advokasi ini memiliki peran sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap sebuah isu atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai tujuannya (Azizah, 2013). TANs memiliki peran yang penting lebih dari aktor non-negara dalam mempengaruhi perhitungan kepentingan negara. Jaringan ini terdiri dari aktivis individu, NGO, *inter-state* dan organisasi internasional, dan bahkan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk perubahan kebijakan (Kwak & Lee, 2009). Isu-isu seperti lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, wanita, kesehatan bayi, dan hak asasi manusia merupakan kajian dari jaringan tersebut. TANs tidak hanya berkontribusi dalam penetapan sebuah agenda, tetapi juga mengusulkan pilihan kebijakan alternatif maupun strategi aksi politik (Keck & Sikkink, 1999). Keck dan Sikkink melihat jaringan advokasi ini sebagai sebuah organisasi yang memiliki ciri tertentu seperti sukarela, timbal balik, dan horizontal. Dalam jaringan advokasi transnasional ini terdapat tujuh aktor utama, yaitu NGO berskala domestik atau internasional, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999).

Menurut Keck and Sikkink, pada jaringan advokasi transnasional ini, pemerintah merupakan aktor yang penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ketika hubungan pemerintah dan masyarakat terhambat, dimana tertutupnya akses antara masyarakat dan pemerintah, maka akan terbentuk pola hubungan yang disebut “*boomerang pattern*”. Pola ini merupakan suatu strategi dari jaringan advokasi transnasional untuk mengubah perilaku dari negara (Keck & Sikkink, 1999). Jaringan advokasi transnasional akan mencari bantuan dan sekutu internasional untuk menekan pemerintah dari luar negaranya, karena pemerintah sebagai aktor penting dalam melindungi masyarakatnya tidak mampu menjalankan perannya dengan baik dan justru menutup semua akses masyarakat. Bantuan internasional dapat memperkuat tuntutan domestik, menggunakan ruang terbuka untuk isu-isu kemanusiaan, dan kemudian menyuarakannya ke arena publik domestik.

(Keck & Sikkink, 1999)



Dalam melancarkan tindakannya, jaringan advokasi transnasional ini menggunakan cara-cara yang dapat diaplikasikan untuk semakin mempermudah jaringan ini mencapai tujuannya. Keck dan Sikkink mengemukakan empat cara yang digunakan oleh jaringan advokasi ini, yaitu (Keck & Sikkink, 1999):

1. *Information Politics*, kemampuan untuk memobilisasi informasi politik secara cepat dan kredibel yang berguna untuk menggerakkan target dengan mengirimkan informasi tersebut ke tempat yang mendapat pengaruh kuat.
2. *Symbolic Politics*, kemampuan dalam menyampaikan secara simbolik, baik melalui tindakan atau narasi mengenai situasi yang sedang dialami untuk menarik perhatian masyarakat lain yang berada pada jarak jauh.
3. *Leverage Politics*, kemampuan untuk menarik aktor yang memiliki *power* lebih kuat untuk mempengaruhi situasi tertentu dan memperkuat jaringan yang memiliki *power* lemah.
4. *Accountability Politics*, merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki *power* lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan maupun prinsip-prinsip yang telah dibuat.

Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan pengaruh dari pertumbuhan struktur global sebagai perlawanan terhadap bentuk struktur tata kelola global yang kompleks dan beraneka ragam. Konsep ini merupakan konsep yang dinilai efektif untuk menjelaskan pergerakan masyarakat sipil yang sifatnya transnasional. Sejak tahun 1990-an, aktivisme transnasional telah tumbuh bersamaan dengan institusi antarnegara dan merupakan sebuah tanggapan terhadap tantangan baru pada pemerintahan dunia (Gilson, 2011). Manuel Castells, beranggapan bahwa jaringan transnasional tersebut turut mempengaruhi komunikasi global (Castells, 2008). Pergerakan masyarakat sipil transnasional dapat dijelaskan dari pola hubungan sosialnya dengan melihat jaringan (*networks*) yang terbangun. Castells juga menekankan pentingnya media sebagai agen perubahan yang memobilisasi politik dalam isu yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil melalui jaringan transnasional, dan membingkai opini publik, serta membawanya melintasi batas.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas konsep *transnational advocacy networks* (TANs) telah menjelaskan gerakan masyarakat sipil pada sebuah isu tertentu membentuk suatu jaringan transnasional. Hal ini sesuai dengan *boomerang patterns*,

dimana jaringan advokasi transnasional memberikan dorongan bagi pemerintah melalui aktor luar ketika pemerintah negaranya menutup akses. Jaringan advokasi transnasional ini memberikan penekanan kepada pemerintah melalui dukungan internasional, agar mengambil kebijakan yang tepat untuk memperhatikan suatu isu tertentu yang diperjuangkan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian ini menganalisa lebih jauh upaya gerakan NGO di Thailand dalam mengkritisi isu LGBT yang menuntut kesetaraan dan keadilan, kemudian menjalin kerjasama dengan aktor internasional baik itu NGO internasional maupun organisasi internasional. Selanjutnya, jaringan advokasi transnasional ini mempengaruhi dan mendorong penerapan kebijakan yang ramah terhadap kaum LGBT di Thailand. Upaya-upaya ini sebagai cara mencapai hasil legalisasi atau pengakuan terhadap kaum LGBT sehingga bisa mendapatkan akses publik dan pekerjaan untuk memaksimalkan kemampuan pembangunan bagi kehidupannya.

Domestic Cultural Values

Menurut *Oxford English Dictionary*, nilai adalah sesuatu yang penting dan dianggap layak serta berarti. Sedangkan, norma diartikan sebagai sesuatu yang lazim, khas atau standar. Nilai dan norma memiliki peran penting bagi perilaku dan penerimaan masyarakat. Kebijakan suatu negara bukan hanya menyangkut kepentingan nasional tetapi juga tentang perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (Steans, Pettiford, & Diez, 2005). Hal ini seperti konsep yang dikemukakan oleh Cortell dan Davis mengenai konsep *domestic cultural values*. Kebijakan yang terkandung norma internasional di dalamnya memiliki kecocokan dengan norma domestik suatu negara disebut sebagai *cultural match* atau keselarasan kultural (Cortell & Davis, 2002). *Cultural match* ini merupakan keadaan dimana ketentuan yang terkandung pada norma internasional bersifat konvergen dengan norma domestik, hal ini dapat terlihat pada sistem hukum dan birokrasi negara.

Pada *cultural match* ini terdapat skala tertentu yang membedakan tingkat penerimaan masyarakat. Pertama, satu sisi dinamakan ‘keselarasan positif’ yang menunjukkan adanya kesesuaian penuh antara norma internasional dan norma domestik dalam suatu isu tertentu. Kedua, di sisi tengah ada yang disebut dengan ‘*null match*’ yang berarti pada wilayah domestik tidak terdapat hambatan yang bersifat normatif terhadap sistem tertentu. Kemudian, sisi yang lain terdapat ‘keselarasan negatif’ yang berarti kondisi dimana tidak adanya kesesuaian sama sekali antara norma internasional dan domestik (Cortell & Davis, 2002). Perbedaan tersebut menghasilkan respon yang berbeda dari masyarakat. Apabila terjadi keselarasan antara norma internasional dan domestik, maka masyarakat akan mudah untuk mematuhi kebijakan tersebut. Begitu yang terjadi sebaliknya, apabila tidak ada keselarasan maka masyarakat cenderung akan menolak dan bahkan mampu menyebabkan konflik karena menilai tidak efektifnya norma tersebut. Oleh karena itu, agar bila norma internasional dapat diterapkan dalam ranah domestik, maka ketentuan yang terdapat di dalamnya harus memiliki keselarasan dengan norma domestik pada masyarakat.

Berdasarkan konsep dari Cortell dan Davis, perilaku ataupun penerimaan masyarakat Thailand terhadap legalisasi *LGBT Rights* oleh pemerintah Thailand melalui dorongan dari TANs dan organisasi internasional dapat dianalisa menggunakan konsep ini. Perilaku ataupun penerimaan masyarakat Thailand dapat dilihat melalui adanya keselarasan norma internasional dan domestik. Norma dan nilai domestik di Thailand yang terepresi dapat muncul kembali dan membantu proses penerapan kebijakan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Thailand.

1.5. Argumen Utama

Berdasarkan konsep *Boomerang Patterns* oleh Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* di Thailand yang terdiri dari NGO seperti *Rainbow Sky Association*, *Purple Sky*, *Foundation for SOGI Rights and Justice* (FOR-SOGI), dan *Anjana Suvarnananda* mencapai keberhasilan dalam mendorong legalitas LGBT

karena melakukan cara-cara dengan *informations politics* (penyebaran informasi maupun norma melalui media dan publik), *symbolic politics* (kampanye dan demonstrasi terhadap kasus diskriminasi kaum homoseksual), *leverage politics* (menarik UNDP, USAID, ILO, dan ILGA), dan *accountability politics* (mendorong pemerintah dalam pengakuan atau legalitas terhadap kaum LGBT di Thailand). Selain itu berdasarkan konsep *domestic cultural values* yang dikemukakan oleh Cortell & Davis, legalitas LGBT di Thailand dapat diterima oleh masyarakat karena adanya kongruensi atau kesesuaian dengan norma dan nilai tentang seks dan gender di Thailand. Norma dan nilai di masyarakat ini sempat terepresi saat perubahan sistem pemerintahan, namun akhirnya muncul kembali dan berpengaruh bagi pandangan masyarakat Thailand sehingga masyarakat mendukung upaya TANs dan menerima kaum LGBT melalui legalitas LGBT *Rights*.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pembahasan hubungan analitis dari jaringan advokasi transnasional yang dibangun oleh NGO di Thailand dalam isu LGBT. Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen. Data yang digunakan dapat berupa data primer yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Thailand, *United Nations* (UN) dan lembaga resmi di bawah naungan UN, serta laporan resmi dari NGO terkait di Thailand. Selain itu, juga menggunakan sumber data sekunder terpercaya seperti buku, jurnal, artikel internet, dan sebagainya. Penulis berupaya mengumpulkan berbagai data sehingga dapat menjelaskan jaringan advokasi transnasional LGBT di Thailand dan prosesnya dalam mendorong legalitas LGBT di Thailand.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama berupa Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, reuiu literatur, kerangka

konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua akan membahas mengenai situasi kaum LGBT di Thailand sebelum adanya legalisasi, dimana terdapat gelombang perlawanan terhadap bentuk diskriminasi dan perbedaan status sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pemahaman tentang sejarah budaya Thailand terkait seksualitas dan gender, yang mana mengalami perubahan sejak pergantian sistem monarki konstitusional. Sehingga, memarginalkan kaum LGBT yang dianggap sebagai perilaku abnormal. Permasalahan diskriminasi terhadap kaum LGBT ini memunculkan jaringan advokasi transnasional yang mendorong legalitas LGBT *Rights* di Thailand. Bagian ketiga akan dijelaskan lebih lanjut dengan memetakan aktor-aktor terkait dalam gerakan LGBT di Thailand yang membentuk jaringan advokasi transnasional, baik itu NGO di Thailand dan organisasi internasional. Selain itu, pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana peran masing-masing aktor dalam jaringan transnasional dan juga memaparkan berbagai strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional tersebut. Sehingga, pada akhirnya jaringan ini mencapai keberhasilannya mendorong penerapan legalitas LGBT *Rights* di Thailand yang melindungi kaum LGBT.

Bagian keempat, akan membahas mengenai respon dari masyarakat di Thailand mengenai adanya legalitas LGBT *Rights*. Melalui bagian ini akan dijelaskan bagaimana peran norma dan nilai mengenai seks dan gender terhadap perilaku dan penerimaan masyarakat Thailand. Norma dan nilai ini merupakan keselarasan dari norma internasional dan norma domestik tentang kepercayaan homoseksual yang sempat teresepresi. Kemudian, bagian ini juga memaparkan kehidupan kaum LGBT di Thailand setelah adanya legalitas LGBT *Rights*. Bagian kelima dari penelitian ini berisikan kesimpulan dari seluruh isi tulisan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, bahwa TANs di Thailand berhasil mencapai legalitas LGBT karena adanya dukungan masyarakat lokal melalui norma dan nilai budaya, dan adanya dukungan internasional. Bagian ini juga menjadi penutup dari penelitian ini.